

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun masih memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Pertama penelitian oleh Rifani (2016) dengan judul Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak di Desa Dadap, Kecamatan Juntianyut, Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap Ibu yang bekerja sebagai TKW. Selain itu juga mengulas tentang upaya pemerintah desa dalam membina moral anak dan hasil dari pembinaan moral terhadap anak. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persepsi masyarakat bahwa ibu yang menjadi TKW belum melaksanakan peranannya secara optimal baik dia sebagai orangtua anak maupun sebagai istri dalam keluarga. Terkait peranan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna, Remaja Masjid serta Sekolah Diniyah. Terakhir, terdapat gangguan perkembangan moral anak dikarenakan kurang konsistennya perhatian yang diberikan kepada anak secara optimal<sup>21</sup>.

Kedua penelitian oleh Apriyanti (2011) berjudul Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga TKW di Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Peneliti tertarik meneliti dikarenakan adanya fenomena kurang optimalnya keberfungsian peranan ibu dalam keluarga dikarenakan bekerja di luar

---

<sup>21</sup> Riafani. 2016. "Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak Di Desa Dadap, Kecamatan Juntianyut, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

negeri. Rumusan masalah penelitian ini antara lain;(a) Bagaimana penanaman nilai-nilai pendidikan karakter terhadap anak oleh keluarga TKW, (b) Strategi pendidikan karakter yang digunakan oleh keluarga TKW serta, (c) Hambatan yang dialami dalam melakukan pendidikan karakter. Hasil peneltian menunjukkan bahwa dengan tidak adanya peranan ibu dalam mendidik anak, maka peranan ibu digantikan oleh ayah dan juga terkadang dibantu oleh anak terbesar maupun keluarga lainnya seperti nenek maupun tante. Sedangkan pendidikan karakter yang diterapkan oleh keluarga TKW kepada anak dinilai kurang maksimal dikarenakan pola pendidikan dari pengasuh yang tidak konsisten. Selain itu ditemukan hambatan dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu minimnya pendidikan pengasuh, keterbatasan waktu serta adanya perbedaan pola pengasuhan di antara keluarga. Hambatan eksternal meliputi pengaruh negatif dari teman sebaya, lingkungan yang tidak mendukung dalam proses pendidikan karakter serta keluarga TKW yang selalu menjadi sorotan masyarakat atas tingkah lakunya<sup>22</sup>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti (2013) yang berjudul Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pola pengasuhan anak pada keluarga (TKW) yang kemudian dianalisis menurut tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam. Penelitian ini berfokus pada pola pengasuhan anak pada keluarga TKW dan pola pengasuhan anak pada keluarga

---

<sup>22</sup> Apriyanti. 2011. "Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga TKW Di Desa Runggang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

TKW berbasis pada nilai ke-Islaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang berbeda menghasilkan kepribadian yang berbeda-beda pula. Kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh pengasuhnya. Terdapat dua dampak yang terjadi pada anak di tempat penelitian yaitu berdampak positif dan negative. Dampak positif yakni anak menjadi mandiri, pintar bersosialisasi dan rajin. Dampak negatifnya adalah nakal, putus sekolah dan pergaulan bebas<sup>23</sup>.

Keempat, penelitian oleh Murniati (2017) dengan judul Dampak Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perilaku Anak (Studi di Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya menjadi TKI di Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang dampak TKI terhadap perilaku anak dan strategi TKI yang ditinggalkan di Kelurahan Gerantung. Hasil penelitiannya antara lain: a) anak ikut dalam pergaulan bebas, b) kurangnya pendidikan agam terhadap anak, c) anak melakukann kejahatan atau criminal yakni pencurian. Selain itu strategi TKI dalam memberikan perhatian antara lain: a) melakukan komunikasi yang konsisten antara orang tua dengan anak, b) memberikan penghargaan kepada anak, serta c) menjaga keutuhan keluarga<sup>24</sup>.

Kelima, penelitian oleh Hendy (2016) berjudul Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI ( Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten

---

<sup>23</sup> Riyanti, Siti Hajar. 2013. "Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga.

<sup>24</sup> Murniati. 2017. "Dampak Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perilaku Anak (Studi di Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi tidak diterbitkan, Mataram: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Mataram.

Tulungagung. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan dan asuh anak TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak kasih sayang anak dapat berjalan maksimal meskipun terjadi kekosongan peran ibu yang bekerja sebagai TKI. Hal ini dikarenakan peran pengganti mampu menggantikan peranan ibu secara baik. Sedangkan untuk hak pendidikan tidak cukup hanya diserahkan pada lembaga pendidikan semata, melainkan peranan keluarga<sup>25</sup>.

Perbedaan yang paling mencolok adalah kelima penelitian mengkaji tentang dampak pekerja migran terhadap keluarga terkhusus pemenuhan hak anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang Program Peduli yang bertujuan untuk memenuhi hak anak secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada sistem keluarga saja serta mendeskripsikan pengimplementasian program serta hambatan yang didapati ketika pelaksanaan Program Peduli dalam upaya pemenuhan hak anak.

## **B. Konsep Implementasi**

### **1. Definisi Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah proses perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan serta pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah

---

<sup>25</sup>. Arfyansyah, Hendy. 2016. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Thesis tidak diterbitkan. Malang: Sekolah Pascasarjana. UIN Maulana Malik Ibrahim

bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi tidak hanya diartikan sebagai aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan<sup>26</sup>. Arti lainnya adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>27</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu sistem atau aktivitas yang telah disusun secara sistematis dengan harapan sesuai dengann tujuan yang ingin dicapai. Jadi implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi terdapat proses perencanaan, pelaksanaan terhadap Program Peduli oleh LP3TP2A dalam upaya pemenuhan hak anak bagi anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

## 2. Tahapan Implementasi

Secara umum implementasi tidak dapat dilepaskan dari aspek manajerial yang membahas secara komrehensif baik dalam tahap pra, proses dan pasca. Penting kiranya peneliti mengkaji Program Peduli baik dalam proses pelaksanaan dan faktor penghambat maupun pendukung. Menurut Anton Athetaillah meliputi fungsi manajemen antara lain:

### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan hingga pencapaian tujuan.

Dalam perencanaan terdapat penentuan-penentuan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Athetaillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia

<sup>27</sup> Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. Hal 70.

- a. Bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Prosedur pelaksanaan program;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan;
- d. Arah dan tujuan yang hendak dicapai;
- e. Personal dalam melaksanakan rencana
- f. Waktu pelaksanaan program
- g. Anggaran biaya yang dibutuhkan.

## 2) *Organizing*

*Organizing* adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasi hubungan kerja yang sinergis.

## 3) *Coordinating*

*Coordinating* adalah mengoordinasikan yaitu menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan. Adanya beragam tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan.

## 4) *Controlling*

Pengendalian yakni meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deksripsi kerja masing-masing personal atau bidang.

5) *Evaluating*

Evaluasi adalah menilai semua kegiatan untuk menemukan indicator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaia tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya.

6) *Budgeting*

Budgeting yaitu penyusunan anggaran biaya yakni setiap lembaga membutuhkan pembiayaan yang terencana dengan matang. Maka dari itu, dana yang diperoleh harus diperhatikan sebelum mengeluarkan dana untuk kegiatan tertentu, Suatu anggaran merupakan rencana penggunaan terhadap sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terpadu.

7) *Actuating*

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Pembagian tugas menjadi acuan utama dalam melaksanakan kegiatan supaya program dapat berjalan sesuai ekspektasi yang diharapkan.

8) *Forecasting*

Kegiatan peramalan termasuk upaya memprediksi sebagai kemungkinan yang akan terjadi setelah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan memperkirakan biasanya didasari pada hasil pengawasan dan evaluasi

sehingga dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan mempersiapkan alternatif yang akan diambil dalam suatu keputusan.

#### 9) *Staffing*

Staffing termasuk kegiatan organisasi yang sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

#### 10) *Directing and Commanding*

*Directing and Commanding* merupakan kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan instruksional para pemegang jabatan dalam organisasi. Dilihat dari fungsinya, proses ini merupakan bagian dari supervise organisasi. Maka dari itu, selalu berhubungan dengan adanya kekuasaan hirarkis dalam organisasi dalam manajerial personalia, pendanaan maupun pelaksanaan program.

Menurut Isbandi Rukminto Adi<sup>28</sup>, implementasi program pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti Program Peduli sebagai formulasi kebijakan Pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak tentunya membutuhkan tahapan dalam mengimplementasikan program pelayanan sosial. Berikut adalah tahapan implementasi meliputi:

##### 1. Tahap Persiapan (*Engagement*)

Pada tahap persiapan ini terdapat dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu (a) Penyiapan Petugas; dan (b) Penyiapan Lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini tenaga pelaksana program layanan yang

---

<sup>28</sup> Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm 182



bisa juga dilakukan oleh *community worker* dan penyiapan lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu program pelayanan masyarakat yang pada dasarnya dilakukan secara non-direktif.

Penyiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sedangkan pada tahap penyiapan lapangan yang dikenal juga dengan tahapan engagement, petugas program pada awalnya melakukan studi kelayakan yang akan dijadikan sasaran, baik secara formal maupun informal. Guna menjaga dan mengembangkan kontak dengan masyarakat, tidak jarang petugas program harus menawarkan bentuk kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata dalam hal ini pemenuhan hak anak pada anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

## 2. Tahap Pengkajian (*Assesment*)

Proses *assessment* dapat dilakukan secara individual melalui tokoh masyarakat, tetapi juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan-*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien baik itu dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Dalam melakukan *assessment* ini sebaiknya masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang harus diselesaikan. Selain itu, tahapan ini pelaku perubahan juga memfasilitasi

warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya yaitu pada tahap perencanaan<sup>29</sup>.

### 3. Tahap Perencanaan Alternatif Program (*Designing*)

Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Program dan kegiatan yang akan dilakukan akan mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul program-program yang bersifat charity yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang<sup>30</sup>.

### 4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (*Designing*)

Pada tahap pemformulasian rencana aksi ini, diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian mereka dapat mengarahkan tindakan itu sesuai dengan apa yang sudah diformulasikan<sup>31</sup>.

### 5. Tahap Pelaksanaan Program (Implementasi)

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat. Pada pelaksanaan program, peran masyarakat sangatlah

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 186

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 188

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 190

diharapkan agar dapat menjaga keberlangsungan program yang dijalankan<sup>32</sup>.

#### 6. Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang dijalankan dengan melibatkan warga. Keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan agar mampu membentuk kesadaran terhadap sistem yang dijalankan. Akan tetapi kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perencanaan sehingga dibutuhkan umpan balik untuk melakukan perubahan untuk memperbaiki program kedepannya<sup>33</sup>.

#### 7. Tahap Terminasi (*Disengagement*)

Tahapan ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri atau permasalahan selesai, tetapi dikarenakan proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditentukan, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Oleh karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum selesai dengan baik tidak jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan sasaran<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 190

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 193

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 195

### C. Konsep Program Peduli<sup>35</sup>

Program Peduli adalah sebuah prakarsa Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan inklusi sosial bagi enam kelompok yang paling terpinggirkan di Indonesia yang kurang mendapat layanan Pemerintah dan program perlindungan sosial. Enam kelompok sasaran tersebut adalah: 1) Anak dan remaja rentan, 2) Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, 3) Korban diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasis agama, 4) Orang dengan disabilitas, 5) Hak asasi manusia dan restorasi sosial, dan 6) Waria.

Pada 2014, administrasi Joko Widodo menetapkan Sembilan prioritas pembangunan atau “Nawa Cita” untuk periode lima tahun, dari 2015 sampai 2019. Peduli mendukung lima komitmen “Nawa Cita” yaitu:

- a. Nawacita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Nawacita 2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Nawacita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Nawacita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- e. Nawacita 9: Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Program Peduli bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk berkontribusi

---

<sup>35</sup> “Tentang Program Peduli”. (Online) <https://programpeduli.org/tentang/> (diakses 21 Januari 2019)

terhadap pengurangan kemiskinan pada perempuan, anak-anak dan kelompok terpinggirkan dengan memenuhi kebutuhan dan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pembangunan manusia dan restorasi sosial.

Pada tahap pertama, program ini bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli dan difasilitasi selama 2011-2014 oleh PNPM Support Facility (PSF)-World Bank. Pada Maret 2014, The Asia Foundation ditetapkan sebagai mitra pengelola Program Peduli fase II, dengan dana dari Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri Perdagangan Australia. Pada Desember 2016, Program Peduli diperpanjang sampai Desember 2018. Pada Program Peduli fase ini, kegiatan lebih difokuskan untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi dalam pembangunan Indonesia, dengan meningkatkan akses pelayanan dasar dan penerimaan sosial bagi mereka yang terpinggirkan. Program Peduli bekerja sama dengan Sembilan organisasi mitra payung di tingkat nasional dan 69 organisasi masyarakat sipil di 75 kota/kabupaten yang tersebar di 21 provinsi.

#### **D. Konsep Keluarga**

##### **1. Definisi Keluarga**

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda). Sedangkan menurut Effendy (2005), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan

saling ketergantungan. Berdasarkan sebabnya, menurut Sigmund Freud pada dasarnya keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara pria dan wanita. Terdapat beberapa karakteristik keluarga secara umum yaitu:

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan, hubungan darah atau adopsi.
- b. Anggota keluarga hidup bersama di bawah satu atap (rumah) merupakan satuan rumah tangga atau mereka menganggapnya sebagai rumah sendiri.
- c. Keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain menurut peranan masing-masing, seperti misalnya sebagai suami istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakak atau adik laki-laki atau perempuan.
- d. Keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari budaya umum (masyarakat) dan keluarga sering kali mempraktikkannya sendiri dalam bentuk tertentu.

## 2. Peran Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang penting dalam perkembangan anak. Proses internalisasi nilai pada setiap tahap perkembangan akan mempengaruhi kondisi psiko-sosial anak. Penting kiranya mengetahui peran keluarga secara umum agar berguna untuk membangun generasi yang berkualitas baik secara intelektual dan moral. Sebagai kelompok sosial terkecil, peranan yang kompleks didalamnya memiliki tugas masing-masing terhadap komponen yang lain, contoh hubungan antara ayah dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik dan seterusnya. Sehingga saling ada keterkaitan dalam keluarga yang akan berpengaruh terhadap yang lainnya.

Peranan keluarga sangatlah penting, termasuk keluarga Pekerja Migran yang mengalami pergantian peran dengan keluarga asuh contohnya. Sehingga diperlukan peranan keluarga yang mampu mengakomodir terpenuhinya hak anak secara komprehensif.

### 3. Fungsi Keluarga

Telah dijelaskan diatas bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinya, peradaban bangsa juga dipengaruhi oleh internalisasi nilai yang diajarkan oleh keluarga. Menurut Kingslet Davis, fungsi keluarga antara lain<sup>36</sup>:

- a. *Reproduction*; yaitu menggantikan apa yang telah habis atau hilang untuk kelestarian sistem sosial yang bersangkutan.
- b. *Maintenance*; yaitu perawatan dan pengasuhan anak hingga mereka mampu berdiri sendiri.
- c. *Placement*, memberi posisi sosial kepada setiap anggotanya baik itu posisi sebagai kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga, ataupun posisi-posisi lainnya.
- d. *Sosialization*, pendidikan serta pewarisan nilai-nilai sosial sehingga anak-anak kemudian dapat diterima dengan wajar sebagai anggota masyarakat.
- e. *Economics*, mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa dengan jalan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilakukan di antara anggota keluarga.
- f. *Care of the ages*, perawatan bagi anggota keluarga yang telah lanjut usianya.

---

<sup>36</sup> Satya, Dyan dkk. 2015. "Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak" dalam Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No 1, Juni 2015.

- g. *Political center*, memberikan posisi politik dalam masyarakat tempat tinggal.
- h. *Phisical protection*, memberikan perlindungan fisik terutama berupa sandang, pangan dan perumahan bagi anggotanya.

## **E. Konsep Hak Anak**

### **1. Definisi Hak<sup>37</sup>**

Secara terminologis, hak menurut KBBI adalah segala hal yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu kehendak (hal ini karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, statuta, dsbg. Dalam buku berjudul "*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Recht*", Prof. M. L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjadi suatu kekuasaan.

Menurut C.S.T. Kansil, hak dalam diri dibagi menjadi dua yaitu hak mutlak dan hak nisbi<sup>38</sup>. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
- b. Hak publik mutlak, misalnya: hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

---

<sup>37</sup> Saifudin, Endrik. 2017. "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*". Malang: Setara Press.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 12



- c. Hak keperdataan seperti hak marital yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta-hartanya dan sebagainya.

Sedangkan hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak anak yang peneliti maksud berorientasi pada konsep hak asasi manusia yang mutlak dimiliki oleh manusia.

## 2. Definisi Anak

Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu terdapat beberapa konsep tentang anak antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Huraerah (2007: 19) Unicef mendefinisikan anak adalah:

“Penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun”<sup>39</sup>.

2. Huck dkk dalam Martini (2009: 2) menyatakan bahwa:

“ Yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah anak yang berusia 1 tahun hingga kurang lebih 12 tahun. Huck Juga mengemukakan bahwa tahapan usia anak itu sendiri dibedakan kedalam tahap-tahap sebelum sekolah atau masa pertumbuhan (1-2 tahun), prasekolah dan taman kanak-kanak (3-5 tahun), masa awal sekolah (6-7 tahun), elementer tengah (8-9 tahun), elementer akhir (10-12 tahun)”<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Hendra, dkk. 2016. “*Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)*”. Bandung: Unpad Press. Hlm 34

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 35

3. Pengertian anak menurut Elizabeth Hurlock (1980: 108) menyatakan:

“Anak adalah usia 6 tahun sampai dengan tiba saatnya anak matang secara seksual. Masih tergantung atau masih memerlukan bantuan orang dewasa, sedang dalam perkembangan, sedang mengalami pertumbuhan, sedang dalam masa belajar, rasa keinginan tahun yang besar, suka meniru dan memiliki idola, senang berkumpul dengan teman sebayanya”<sup>41</sup>.

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sebagai warga negara, anak juga memiliki hak khusus yang disebut dengan hak anak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 mendefinsikan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui akan adanya kemungkinan variasi ketentuan batasan umur di dalam perundang-undangan dari tiap-tiap negara peserta.

3. Definisi Hak Anak

Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip utama yang dimiliki oleh anak yaitu:

- a) Prinsip non-diskriminasi yaitu semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- b) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 35

sosial pemerintah maupun badan legislatif harus mempertimbangkan pilihan yang terbaik bagi kehidupan anak.

c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*) yaitu bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan serta negara harus menjami sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) artinya pendapat anak, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya harus diperhatikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia sendiri sudah memiliki basis konstitusi dalam pemenuhan hak anak dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002<sup>42</sup> yang mengandung pemenuhan hak anak sebagai berikut:

- a. Hak hidup yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak sipil yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak kepercayaan yaitu bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Hak asuh ialah anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jika orang tua tidak dapat secara langsung

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2016. Bandung: Diperbanyak oleh Citra Umbara.

mengasuh, maka anak tersebut berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Hak pelayanan dan jaminan sosial maksudnya adalah setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Hak pendidikan ialah setiap hak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Khusus bagi anak penyandang disabilitas juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak berpendapat ialah setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Hak Perlindungan ialah seorang anak harus terlindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan yang menyalahi hukum lainnya. Bahkan secara rinci dalam pasal 15 dijelaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.

- i. Hak beristirahat ialah setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Sedangkan menurut Apsari, (2015:12) dikutip dari Durrant (2007, v) dalam bukunya merangkum hak anak menjadi 3 hak besar yaitu:

- 1) Hak akan keberlangsungan hidup dan pengembangan potensi mereka secara utuh.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan.
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak.

#### **F. Konsep Pekerja Migran**

##### **1. Pengertian Pekerja Migran<sup>43</sup>**

Istilah pekerja migrant mungkin menjadi istilah asing atau baru dalam kosakata ketenaga kerjaan. Istilah TKI maupun TKW mungkin yang lebih familiar difahami oleh masyarakat Indonesia. Pekerja migran adalah istilah baru dalam kosakata ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>44</sup>, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara

---

<sup>43</sup> *Perlindungan Sosial Pekerja Migran Bermasalah Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center*. 2015. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

<sup>44</sup> Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan. 2018. Bandung: Diperbanyak oleh Citra Umbara.

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Dalam perkembangannya, muncul istilah baru yaitu pekerja Indonesia di luar negeri dan buruh migran. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyamakan pengertian buruh dan pekerja sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penekanan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja, baik yang memenuhi syarat atau tidak termasuk didalamnya pekerja anak, ilegal dan lain sebagainya. Sedangkan migran sendiri berasal dari kata migrasi yang berarti tindakan berpindah ke tempat lain baik di dalam suatu negara maupun ke negara lainnya. Migrasi tenaga kerja adalah tindakan berpindah ke negara lain untuk bekerja.

Seperti pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negara asalnya. Negara yang masuk dalam kategori dunia ketiga seperti Indonesia, memang belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Biasanya kita memberi sebutan Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena memang lapangan kerja bagi kaum perempuan lebih besar peluangnya untuk direkrut di sektor informal khususnya pekerja rumah tangga. Keberadaan mereka sering menjadi bahan pemberitaan media massa terkait perlakuan buruk yang diterima di luar negeri. Meski tidak semua buruh migran mengalami hal yang sama, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masih berada dalam situasi rentan karena rendahnya perlindungan dan jaminan keamanan di negeri tujuan.

Berbicara mengenai migran, terdapat beberapa definisi mengenai pekerja migrant dari berbagai sumber. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migrant, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sehingga semi dan sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, negara-negara tempat para migran berasal disebut sebagai negara pengirim dan negara yang dituju disebut sebagai negara tujuan. ILO mendefinisikan seorang pekerja migrant sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja.

Menurut Kementerian Sosial, pekerja migran yaitu seseorang yang mencari pekerjaan di luar daerah asalnya, baik masih di dalam negeri atau domestic maupun ke luar negeri atau lintas negara atau seseorang yang berpindah ke daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri atau lintas negara atau seseorang yang berpindah ke daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini mengandung makna sangat luas dan umum, yaitu meliputi semua orang baik laki-laki maupun perempuan, yang berpindah lintas batas negara (luar negeri)

maupun di dalam negeri, serta tidak membedakan sektor pekerjaan formal maupun informal, domestic atau public serta status hukum legal atau illegal.

Perkembangan terbaru tentang pekerja migran, bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut undang-undang tersebut pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan dari berbagai pendapat diatas bahwa pekerja migran adalah seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang bekerja di negara lain untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

## 2. Faktor Pendorong Pekerja Migran<sup>45</sup>

Merujuk pada pernyataan dari Lubis, (2010: 3) bahwa terdapat beragam alasan untuk menjadi pekerja migrant yaitu:

### a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu untuk membenahi kondisi perekonomian keluarganya. Tanpa terkecuali mereka menggunakan cara untuk menjadi pekerja di luar negeri dengan dalih gaji yang tinggi disbanding dengan dalam negeri.

### b. Faktor Demografi

Pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang demikian pesat, mengakibatkan banyaknya jumlah angkatan kerja. Akibatnya jumlah

---

<sup>45</sup> Hendra, dkk. 2016. *"Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)".* Bandung: Unpad Press.



pengangguran meningkat dikarenakan keterbatasan lapangan kerja, kualifikasi standar pendidikan dan pemutusan hubungan kerja. Terjadinya persaingan yang ketat untuk mendapatkan posisi kerja yang ada, salahsatunya dengan terbukanya kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji yang menggiurkan.

c. Faktor Geografi

Kondisi geografi daerah asal juga menjadi salah satu alasan untuk menjadi pekerja migran. Contohnya adalah terjadinya bencana alam yang menyebabkan mata pencaharian mereka hilang. Akibatnya mereka tertarik untuk bekerja di luar negeri. Selain itu dari aspek geografi ini juga bisa dilihat dari letak daerah asal mereka yang berdekatan dengan negara tujuan bekerja merupakan salah satu alasan untuk bekerja di luar negeri.

d. Faktor Sosial

Masalah sosial menjadi faktor juga terhadap seseorang untuk bekerja di luar negeri. Terjadinya konflik sosial di daerah asal menyebabkan mereka ingin keluar karena merasa tidak aman. Pada akhirnya bekerja di luar negeri menjadi jalan kelyar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Aspek sosial ini juga dapat menjadi daya tarik keberhasilan bagi warga disekitarnya untuk bekerja di luar negeri.

3. Dampak Pekerja Migran Terhadap Anak<sup>46</sup>

Dalam penelitian sebelumnya terdapat beberapa dampak dari pekerja migrant yang meninggalkan anaknya di dalam negeri. Persoalan yang muncul antara lain permasalahan hak pendidikan, hak asuh hingga hak sipil

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 45.

yang belum terpenuhi secara optimal. Terdapat penelitian yang dilakukan Riasih tentang dampak pekerja migran terhadap anak antara lain:

- a. Terganggunya tumbuh kembang anak. Perkembangan anak meliputi aspek kognitif, psikis, fisik dan sosial. Dampak yang akan terjadi pada anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarganya akan terlihat dalam aspek kognitif anak adalah anak yang memiliki IQ rendah, prestasi akademis yang buruk bahkan anak akan mengalami *droup out*.
- b. Kesehatan anak yang tidak terpenuhi seperti gizi buruk pada anak terutama pada anak-anak balita. Anak akan mengalami kesehatan yang buruk karena pola makan yang tidak teratur serta kualitas makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi standar gizi seimbang bagi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.
- c. Pendidikan anak yang tidak terpantau, seperti drop out pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- d. Perkembangan moral, anak tidak diperkenalkan pada sesuatu yang baik dan buruk, nilai agama dan nilai budaya yang akan mendukung perkembangan moral dan sosialnya. Akibat anak akan memiliki pribadi kasar karena mereka kurang mendapatkan perhatian dan pelajaran moral dari sanak keluarga terdekatnya.
- e. Penelantaran anak, anak tidak diperhatikan perkembangan fisik, psikologis dan sosialnya. Keadaan ini menyebabkan anak mengalami perubahan perilaku dimana anak sering menjadi pasif, tidak asertif atau perilaku menarik diri dari lingkungan.

- f. Kekerasan pada anak baik yang dilakukan oleh keluarga maupun orang lain di lingkungannya baik berupa kekerasan fisik, psikologis maupun seksual.

